

DAFTAR PUSTAKA

Perundang-Undangan :

Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2000 Tentang *Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*. (n.d.).

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang *Perangkat Daerah*. (n.d.).

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang *Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. (n.d.).

Peraturan DPRD Kabupaten Jember Nomor 01 Tahun 2019 tentang *Tata Tertib*. (n.d.).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (n.d.).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang *Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*. (n.d.).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang *Aparatur Sipil Negara*. (n.d.).

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang *Pemerintahan Daerah*. (n.d.).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang *Administrasi Pemerintahan*. (n.d.).

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang *Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. (n.d.).

Literatur :

Hadjon, P. d. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* . Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2008

Hakim, A. A. *Impeachment Kepala Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2018.

Ilmar, A. *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: PT. Fajar Interpretama Mandiri. 2016.

Marzuki, P. M. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama. 2016.

MD, M. M. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. 2020.

Sulaiman, K. F. *Dialektika Pengujian Peraturan Daerah Pasca Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2014.

Bahan Ajar :

Mandiana, S. *Handout Metoda Penelitian Hukum*. Fakultas Hukum: Universitas Pelita Harapan Surabaya. 2018.

Mandiana, S. *Perbuatan Melawan Hukum*. Surabaya: Fakultas Hukum UPH Surabaya. 2018.

Mandiana, S. *Handout Metoda Penelitian Hukum (TORT's)*. Surabaya: Fakultas Hukum UPH Surabaya. 2021.

Jurnal :

Boedianto, A. (n.d.). *Hukum Pemerintahan Daerah : Pembentukan Perda APBD Partisipatif*.

BPK, T. J. Wewenang dan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Hukum Administrasi Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. 8-9. 2018.

Brahmana, I. Y., Parsa, I., & Suharta, N. (n.d.). Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. *Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 1-15.

Citrano. (n.d.). Problematika Pengujian Penyalahgunaan Wewenang Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 1-16.

Imamah, S. N. Implementasi Pasal 124 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah Terhadap Keputusan Bupati Jember Dalam Menata Birokrasi. *Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember*, 27-36. 2016.

Marzuki, M. L. Pemakzulan Presiden/Wakil Presiden Menurut Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Konstitusi. Vol.7. No.1*, 16-28. 2010.

Ulum, M. B. Mekanisme Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden Menurut UUD 1945 (Antara Realitas Politik dan Penegakan Konstitusi. *Jurnal Konstitusi. Vol. 7. No. 4*, 131-158. 2010.

Zoelva, H. *Impeachment Presiden: Alasan Tindak Pidana Pemberhentian Presiden Menurut UUD 1945*. Jakarta: Konstitusi Pers. 2005.

Internet :

KBBI . *KBBI Daring*. Retrieved from <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Usul>.

Diakses pada tanggal 07 Agustus 2021.

Purba, D. O. *Regional Kompas*. Retrieved from 1.

[https://regional.kompas.com/read/2020/07/23/10505481/kronologi-](https://regional.kompas.com/read/2020/07/23/10505481/kronologi-konflik-)

konflik- (Purba, 2021)dprd-dan-bupati-jember-faida-hingga-berujung-

pemakzulan?page=all. Diakses pada tanggal 20 Januari 2021.

Supriadi, B. *Regional Kompas*. Retrieved from

[https://regional.kompas.com/read/2020/12/08/19184441/ini-alasan-](https://regional.kompas.com/read/2020/12/08/19184441/ini-alasan-mahkamah-agung-tolak-pemakzulan-bupati-jember-faida?page=all)

mahkamah-agung-tolak-pemakzulan-bupati-jember-faida?page=all.

Diakses pada tanggal 20 Januari 2021.

Supriadi, B. *Regional Kompas*. Retrieved from

[https://regional.kompas.com/read/2020/12/08/18223021/ma-tolak-](https://regional.kompas.com/read/2020/12/08/18223021/ma-tolak-pemakzulan-bupati-jember-faida?page=all)

pemakzulan-bupati-jember-faida?page=all. "MA Tolak Pemakzulan Bupati

Jember Faida". Diakses pada tanggal 25 Januari 2021.

Supriadi, B. *Regional Kompas*. Retrieved from

[https://regional.kompas.com/read/2020/09/09/09233021/perjalanan-](https://regional.kompas.com/read/2020/09/09/09233021/perjalanan-konflik-bupati-faida-dan-dprd-jember-berujung-sanksi-tak-terima?page=all)

konflik-bupati-faida-dan-dprd-jember-berujung-sanksi-tak-

terima?page=all. Diakses pada tanggal 25 Januari 2021.

Utami, Y. T. *Kompasiana*. Retrieved from

[https://www.kompasiana.com/yulia.hba/54f37f2b7455137b2b6c78ca/apa-](https://www.kompasiana.com/yulia.hba/54f37f2b7455137b2b6c78ca/apa-itu-pemimpin)

itu-pemimpin. Diakses pada tanggal 5 Januari 2021.